

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perilaku memilih**

Studi mengenai perilaku pemilih menjadi subjek penelitian yang menarik karena perilaku tersebut memiliki potensi untuk memengaruhi hasil kemenangan dalam Pemilihan Umum legislatif. Menurut Schumpeter, (Syafhendry, 2016, p. 43) Perilaku pemilih saat ini sering diklasifikasikan sebagai pemilih yang bersifat rasional atau tidak rasional. Hal ini terlihat dari kurangnya konsumsi informasi yang berasal dari sumber yang kredibel oleh sebagian besar masyarakat, yang kemudian dapat menghasilkan persepsi yang cenderung dipengaruhi oleh opini publik semata. Selain itu, pandangan dari Brennan menyatakan bahwa pola perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh faktor loyalitas dan ideologi yang dianut oleh masing-masing individu. Perilaku pemilih atau voting behavior adalah suatu tindakan yang diambil oleh seseorang dalam menentukan pilihan mereka terkait dengan calon, pandangan, atau partai politik, baik itu melalui musyawarah maupun dalam konteks Pemilihan Umum.<sup>6</sup>

Menurut Haryanto memberikan suara adalah kewajiban warga negara dalam Pemilihan Umum(Pemilu), yang didasarkan pada hak untuk menentukan dan memiliki keabsahan hukum untuk memilih wakilnya. Dalam konteks tersebut Perilaku pemilih, terdapat keterkaitan dengan tindakan pemungutan suara pada saat

---

<sup>6</sup> Adnan, M, Fachri (2012). *Perilaku memilih pada Pemilihan Kepala Daerah secara langsung*. UNP PRESS. Hal 63

Pemilihan Umum. Pemberian suara merupakan suatu aktivitas yang melibatkan pengambilan keputusan, di mana setiap individu memiliki satu suara yang setara.

Pemberian suara kepada seorang calon mencerminkan rasa kepercayaan dengan harapan bahwa aspirasi, baik dalam jangka panjang maupun pendek, akan direalisasikan. Kepercayaan ini diberikan karena adanya kesamaan nilai yang memiliki arah yang sesuai dengan lokasi pemberian suara. Nilai-nilai tersebut menjadi prioritas organisasi dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>7</sup>

Dalam pemahaman perilaku pemilih, terdapat dua aliran utama, yaitu mazhab Colombia dan mazhab Michigan. Dalam mazhab pertama, penekanannya terletak pada aspek sosiologis sebagai faktor yang signifikan dalam memengaruhi perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Pendekatan ini meyakini bahwa masyarakat memiliki struktur norma dasar sosial yang tergantung pada pengelompokan sosiologis seperti jenis kelamin, usia, kelas sosial, dan agama, yang dianggap berperan besar dalam membentuk perilaku pemilih masyarakat (Gaffar, Affan, 1999:43).

Mazhab Michigan lebih menitik beratkan pada aspek psikologis sebagai faktor yang memiliki dampak terhadap perilaku pemilih. Pola perilaku politik individu dipengaruhi oleh faktor internal seperti tingkat kecerdasan, faktor biologis, dan aspek emosional. Sikap ini muncul sebagai hasil dari proses sosialisasi politik oleh suatu partai, yang kemudian menciptakan simpati terhadap partai politik tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Azmi, Khairul , Astuti P (2016). *Perilaku memilih pemula masyarakat Kendal pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014*. Vol 5, No 03

<sup>8</sup> Ferdian (2019). *Prilaku memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu dan Pelanggaran Pemilu*. Vol 6, No1

Prilaku pemilih didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang terjadi saat mengambil keputusan, termasuk tindakan memilih atau tidak memilih.

### **2.2.1 Pendekatan dalam memahami perilaku pemilih**

Terdapat 5 pendekatan dalam memahami prilaku pemilih yaitu :

#### **1) Pendekatan Sosiologis**

Pemilih lebih condong menggunakan hak pilihnya berdasarkan konteks sosial. Pendekatan ini secara luas menjabarkan terkait *habbit* atau karakteristik sosial di masyarakat yang membentuk kelompok sosial yang berperan penting terhadap perilaku pemilih seseorang (Nursal) Artinya, seseorang ketika memilih dapat dipengaruhi oleh latar belakang demografi, sosial ekonomi, agama, pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, serta jenis pekerjaan.

#### **2) Pendekatan Ekologis**

Menafsirkan bahwa sangat relevan untuk mempertimbangkan perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan lokasi geografis, seperti perbedaan di tingkat Kota, Desa, Kelurahan, Kecamatan, atau Kabupaten.

#### **3) Pendekatan Struktural**

Salah satu pendekatan dalam Prilaku pemilih dalam menentukan hak pilihnya didasarkan pada kerangka yang lebih besar, seperti sistem partai politik, program yang diadvokasi oleh partai, struktur sosial, dan bahkan sistem Pemilihan Umum yang ada

#### **4) Pendekatan Psikologi**

Menempatkan pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan psikologi sosial. Pendekatan ini menafsirkan sikap seseorang atau individu adalah

sebuah refleksi diri seseorang yang menjadikan hal tersebut sebuah variabel yang berpengaruh terhadap pola perilaku politik seseorang, hal tersebut dikarenakan pendekatan ini menggunakan tiga aspek penekanan sebagai kajian utama, dimana para pemilih memiliki ketertarikan atau keterikatan yang kuat dengan partai tertentu dengan memiliki rasa emosional yang kuat.

#### **5) Pendekatan Rasional**

Peluang pemilihan sebagai pertimbangan untung maupun rugi. Pertimbangan ini dapat dilihat dari kemungkinan terbesar yang diperoleh jika dibandingkan dengan kemungkinan yang lain. Pendekatan ini tidak hanya sebagai pertimbangan pemilih saja melainkan para calon juga dapat menggunakan pendekatan ini untuk kemungkinan terpilih pada Pemilu yang akan datang. Bagi pemegang hak suara dalam pemilu, pendekatan ini digunakan dalam mengambil keputusan antara ikut memilih atau tidak.

Perilaku pemilih di tengah-tengah masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh dinamika politik yang terjadi di sekitarnya. Sistem politik, kondisi sosial, dan keragaman budaya menjadi faktor kunci dalam perkembangan demokrasi di suatu negara. Kemudian mengartikan perilaku pemilih sebagai aktivitas penggunaan hak suara yang dilakukan oleh individu dan secara langsung terkait dengan proses pengambilan keputusan, yang dalam konteks ini merujuk pada tindakan memilih atau tidak memilih. (Surbakti Kaesmetan, 2014).

Perilaku politik dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang mencakup proses pembuatan dan implementasi kebijakan politik, melibatkan aktor utama seperti pemerintah dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perilaku politik

dapat dibedakan menjadi dua aspek: pertama, melibatkan institusi dan pejabat pemerintah; kedua, melibatkan perilaku politik masyarakat secara individu maupun kelompok.<sup>9</sup>

Dalam konteksnya, perilaku pemilih memiliki dampak signifikan terhadap pilihan yang dibuat terkait calon dan partai politik. Keputusan ini nantinya akan menentukan siapa yang akan menjadi perwakilan rakyat, baik di tingkat pemerintahan maupun legislatif, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan nyata, perilaku pemilih memainkan peran krusial dalam proses Pemilihan Umum, di mana setiap individu akan memilih dan menentukan hak suaranya terhadap calon legislator, partai politik, kepala daerah, bahkan calon presiden.

## **2.2 Pengertian Politik**

Politik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas atau tindakan yang bertujuan memengaruhi peraturan dan kebijakan publik dengan menggunakan kekuasaan sebagai alatnya, semuanya dilakukan demi kesejahteraan masyarakat umum. Secara ringkas, politik dapat diartikan sebagai upaya memperoleh kekuasaan. Dengan kata lain, politik mencakup segala tindakan yang dilakukan untuk memengaruhi kehidupan kelompok melalui proses pengambilan keputusan.(Kartono,1996). Aristoteles, seorang filsuf terkenal, juga mengartikan dalam teori klasiknya menyatakan bahwa politik adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan niat untuk mencapai kebaikan bersama.

---

<sup>9</sup> Harahap, Rahman , R (2016). Prilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu)Legislatif Kabupaten(Studi Kecamatan Dayun, Dapil II Kabupaten Siak, Tahun 2014) Hal 2

### 2.2.1 Partai Politik

Partai politik sebagai sebuah kelompok otonom warga negara yang bertujuan ikut dalam perncalonan dan bersaing di Pemilihan Umum untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan. partai politik sebagai sebuah kelompok otonom warga negara yang bertujuan ikut dalam perncalonan dan bersaing di Pemilihan Umum untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan. (Rober Huckshom)

Partai politik sangat berpengaruh terhadap kondisi serta masa depan bangsa, karena lewat hasil daripada Pemilu tersebut akan menghasilkan kepemimpinan yang baru, yang dipilih lewat Pemilihan Umum. Makna daripada demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah salah satunya dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan mengantarkan suatu bangsa kepada kepemimpinan serta pemerintahan yang baru, dengan harapan bahwa pemerintahan yang baru tersebut akan memberikan perbaikan kehidupan disegala bidang. Dengan demikian maka perubahan arah kebijakan bangsa dan negara tersebut, tidak terlepas daripada peranan partai partai politik yang mengisi pesta demokrasi rakyat tersebut dengan sejumlah visi dan misi partai yang bervariasi sesuai dengan ideologi yang mereka anut.<sup>10</sup>

Setiap partai politik akan membawa visi dan misi serta idealisme mereka dalam menarik simpati rakyat, dengan demikian diharapkan akan mendapat dukungan yang banyak dari rakyat dalam Pemilihan Umum(Pemilu). Dengan

---

<sup>10</sup> Jafar, Muhammad AW. (2015). *Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia*. Hal 3

demikian akan dengan lancar memperoleh jabatan-jabatan dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat dalam rangka peranannya dalam sebuah negara demokrasi, yang akan memberikan perubahan sosial dan pandangan politik rakyat dengan keberadaan partai politik.

### **2.2.2 Identifikasi Kepartaian**

Dalam hal ini identifikasi kepartaian dipilih sebagai variabel penentu bagi seorang pemilih untuk kemudian menentukan pilihannya pada saat pemilihan umum. Hal ini sendiri dikarenakan dalam sebuah negara yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat atau etnis yang berbeda-beda menjadikan pemilih di Indonesia seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa mereka memiliki kecenderungan-kecenderungan tersendiri untuk kemudian mendasari hubungannya dengan sifat emosional tertentu terhadap orang lain seperti keluarga, tokoh bahkan sampai organisasi tertentu.

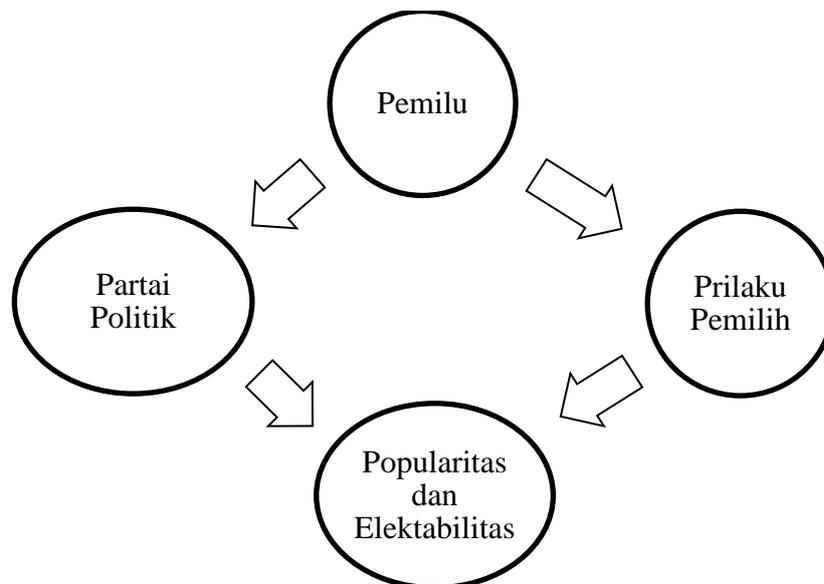
Identifikasi kepartaian sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk perasaan seseorang secara personal terhadap partai yang menjadi pilihannya. Faktor yang mendasari dari adanya identifikasi kepartaian ini yaitu faktor jangka panjang yang memang penting dalam mempengaruhi pemberian suara pada saat pemilihan umum. Michigan sendiri menekankan pada aspek psikologis dari identifikasi kepartaian ini bahwa orang belajar mengidentifikasi partai politik melalui adanya proses sosialisasi gradual yang kemudian adanya pembentukan identifikasi kepartaian ini dianggap sama seperti dengan cara seseorang dalam mengembangkan afiliasi keagamaan pada masa kanak-kanak. Selain itu, Campbell menyatakan lebih

lanjut bahwasanya pemilih mengidentifikasikan diri mereka sendiri dan dalam hal ini tentu dapat mempengaruhi serta menentukan perilaku pemilih.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Karena pada dasarnya Popularitas dan Elektabilitas dua analisis dalam menentukan kemenangan bagi setiap calon yang diangkat oleh setiap partainya untuk bersaing di Pemilihan Umum (Pemilu). Dua faktor tersebut juga dibangun atas dasar adanya sebuah cara dalam memikat pemilih untuk bisa mengumpulkan suara dalam menentukan kemenangan atas sebuah perolehan suara. Pemilih banyak sekali beberapa faktor yang tentu akan bisa menaikkan Elektabilitas dan Popularitas seorang calon dalam sebuah Pemilu. Termasuk dari fokus penelitian kali ini yakni Popularitas dan Elektabilitas partai Gerindra pada Pemilihan Umum di Kota Tasikmalaya yang memiliki beragam bentuk kelompok masyarakat. Pengaruh dari perilaku memilih yang menjadi alasan seseorang memilih baik secara psikologi atau sosiologis, identifikasi partai yang merupakan bentuk perasaan pemilih terhadap partai karena ada suatu hubungan, pemilihan rasional yang didasari dari kinerja calon, dan demografi politik yang tentu melihat pembagian berbagai kelompok masyarakat yang tentu menjadi sasaran politik. kedalam Kerangka pemikiran penulis sajikan untuk menjelaskan perilaku memilih masyarakat di Kota Tasikmalaya mengenai Popularitas dan Elektabilitas Partai Politik Gerindra . Aktor politik harus berusaha untuk memenuhi harapan dan perhatian masyarakat di Kota Tasikmalaya untuk memastikan bahwa perspektif mereka dipertimbangkan selama proses pengambilan keputusan. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan keterwakilan masyarakat pada partai Gerindra. Hal ini dapat dicapai baik dengan

menetapkan kuota untuk kandidat para calon partai Gerindra itu mendapatkan Elektabilitas dalam pemilihan atau dengan membentuk visi misi untuk memberikan panduan kepada pembuat keputusan tentang isu-isu yang mempengaruhi masyarakat di Kota Tasikmalaya. Upaya Ranting Partai Gerindra di Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan kualitas Calon Legislatif agar sesuai dengan harapan masyarakat yaitu dengan cara mengadakan suatu program yang bersentuhan dengan masyarakat contohnya program pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

*Sumber: Data olahan Penulis*

## **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan pada kerangka pemikiran, maka dirancang sebuah hipotesis yang nantinya akan diuji dalam penelitian ini yakni “Popularitas dan Elektabilitas partai Gerindra menjelang Pemilu 2024” menguji kembali tingkat Popularitas dan Elektabilitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dibanding pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 Partai Gerindra yang menjadi ketertarikan masyarakat memilih Calon Legislatif yang diusung oleh partai Gerindra. Suatu masyarakat akan semakin selektif pula seseorang atau individu dalam menentukan pilihannya.